



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN  
TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, perlu adanya penyesuaian kelas jabatan dengan struktur organisasi dan tata kerja yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan Nomor B/4596/M.PAN/11/2014 Tanggal 25 November 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
3. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
4. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
5. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
6. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

### Pasal 2

Kelas Jabatan digunakan sebagai dasar penyempurnaan penyusunan peta jabatan, penyusunan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, evaluasi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi dan redistribusi pegawai serta pemberian tunjangan.

### Pasal 3

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
  - a. Kelas Jabatan Struktural;
  - b. Kelas Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - c. Kelas Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Kelas Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Kelas Jabatan Struktural di Badan Pertanahan Nasional Pusat;
  - b. Kelas ...

- b. Kelas Jabatan Struktural di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
  - c. Kelas Jabatan Struktural di Kantor Pertanahan.
- (3) Kelas Jabatan Struktural di Badan Pertanahan Nasional Pusat, Kelas Jabatan Struktural di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kelas Jabatan Struktural di Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Kelas Jabatan Fungsional Tertentu dan Kelas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2014

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL



FERRY MURSYIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 11822

## LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA  
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALDAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
1	2	3
	KANTOR PUSAT	
1	Menteri/Kepala	Tanpa Kelas
2	Sekretaris Utama	17
3	Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama	15
4	Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat	12
5	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I	9
6	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II	9
7	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III	9
8	Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah	12
9	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah I	9
10	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah II	9
11	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah III	9
12	Kepala Bagian Kerja Sama	12
13	Kepala Subbagian Kerja Sama Regional	9
14	Kepala Subbagian Kerja Sama Sektoral	9
15	Kepala Subbagian Kerja Sama Internasional	9
16	Kepala Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Akuntabilitas	12
17	Kepala Subbagian Pemantauan	9
18	Kepala Subbagian Evaluasi	9
19	Kepala Subbagian Akuntabilitas	9

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
20	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	15
21	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	12
22	Kepala Subbagian Organisasi	9
23	Kepala Subbagian Tata Laksana	9
24	Kepala Subbagian Analisis Jabatan dan Kinerja Organisasi	9
25	Kepala Bagian Pengembangan Kepegawaian	12
26	Kepala Subbagian Pengadaan dan Pengembangan Kapasitas Pegawai	9
27	Kepala Subbagian Karir Jabatan Struktural dan Fungsional	9
28	Kepala Subbagian Penilaian Kompetensi Pegawai	9
29	Kepala Bagian Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai	12
30	Kepala Subbagian Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Wilayah I	9
31	Kepala Subbagian Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Wilayah II	9
32	Kepala Subbagian Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Wilayah III	9
33	Kepala Bagian Umum Kepegawaian	12
34	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Sistem Informasi Kepegawaian	9
35	Kepala Subbagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	9
36	Kepala Subbagian Penegakan Disiplin dan Kode Etik	9
37	Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	15
38	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan	12
39	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala	9
40	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama	9
41	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi I	9
42	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi II	9
43	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi III	9
44	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi IV	9
45	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi V	9
46	Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Khusus	9
47	Kepala Bagian Protokol	12

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
48	Kepala Subbagian Protokol Kepala	9
49	Kepala Subbagian Protokol Pimpinan	9
50	Kepala Bagian Keamanan	12
51	Kepala Subbagian Pengamanan Pimpinan	9
52	Kepala Subbagian Pengamanan Dalam	9
53	Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran	15
54	Kepala Bagian Anggaran dan PNBP	12
55	Kepala Subbagian Anggaran I	9
56	Kepala Subbagian Anggaran II	9
57	Kepala Subbagian PNBP	9
58	Kepala Bagian Perbendaharaan dan Tata Laksana Keuangan	12
59	Kepala Subbagian Tata Laksana Keuangan	9
60	Kepala Subbagian Perbendaharaan	9
61	Kepala Subbagian Pencairan Anggaran	9
62	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan	12
63	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I	9
64	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II	9
65	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III	9
66	Kepala Biro Umum	15
67	Kepala Bagian Sarana, Prasarana dan Layanan Pengadaan	12
68	Kepala Subbagian Perencanaan Sarana dan Prasarana	9
69	Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan	9
70	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	12
71	Kepala Subbagian Pengelolaan BMN Wilayah I	9
72	Kepala Subbagian Pengelolaan BMN Wilayah II	9
73	Kepala Subbagian Pengelolaan BMN Wilayah III	9
74	Kepala Bagian Rumah Tangga	12
75	Kepala Subbagian Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Gedung	9
76	Kepala Subbagian Pengelolaan Kendaraan dan Perjalanan Dinas	9
77	Kepala Bagian Tata Usaha, Persuratan dan Kearsipan	12
78	Kepala Subbagian Tata Usaha Pelayanan Pertanahan	9

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
79	Kepala Subbagian Tata Persuratan	9
80	Kepala Subbagian Kearsipan	9
81	Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan	17
82	Direktur Pengukuran Dasar	15
83	Kepala Subdirektorat Teknologi Pengukuran, Pemetaan dan Peralatan	12
84	Kepala Seksi Teknologi Pengukuran dan Pemetaan	9
85	Kepala Seksi Peralatan Teknis	9
86	Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pengukuran Dasar	12
87	Kepala Seksi Penyiapan Pengukuran Dasar	9
88	Kepala Seksi Kerangka Dasar	9
89	Kepala Subdirektorat Surveyor Pemetaan dan Surveyor Berlisensi	12
90	Kepala Seksi Penyiapan Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan	9
91	Kepala Seksi Surveyor Berlisensi	9
92	Direktur Pemetaan Dasar	15
93	Kepala Subdirektorat Monitoring dan Kendali Mutu	12
94	Kepala Seksi Kendali Mutu	9
95	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	9
96	Kepala Subdirektorat Terestris Dan Citra Penginderaan Jauh	12
97	Kepala Seksi Terestris	9
98	Kepala Seksi Citra Penginderaan Jauh	9
99	Kepala Subdirektorat Informasi Geospasial Pertanahan	12
100	Kepala Seksi Penyiapan Basis Data Pemetaan	9
101	Kepala Seksi Informasi Data Geospasial	9
102	Direktur Penetapan Batas	15
103	Kepala Subdirektorat Pengukuran Batas	12
104	Kepala Seksi Pengukuran Bidang	9
105	Kepala Seksi Pengukuran Kawasan, Ruang dan Perairan	9
106	Kepala Subdirektorat Pemetaan Batas	12
107	Kepala Seksi Pemetaan Bidang	9
108	Kepala Seksi Pemetaan Kawasan, Ruang dan Perairan	9
109	Kepala Subdirektorat Basis Data dan Informasi Batas	12

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
110	Kepala Seksi Basis Data Bidang, Ruang dan Perairan	9
111	Kepala Seksi Informasi Bidang, Ruang dan Perairan	9
112	Direktur Survei dan Pemetaan Tematik	15
113	Kepala Subdirektorat Survei Tematik	12
114	Kepala Seksi Survei Tematik Bidang	9
115	Kepala Seksi Survei Tematik Kawasan	9
116	Kepala Subdirektorat Pemetaan Tematik	12
117	Kepala Seksi Pemetaan Tematik Bidang	9
118	Kepala Seksi Pemetaan Tematik Kawasan	9
119	Kepala Subdirektorat Informasi Geospasial Tematik	12
120	Kepala Seksi Pemeliharaan Sistem Informasi	9
121	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Geospasial Tematik	9
122	Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat	17
123	Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah	15
124	Kepala Subdirektorat Pengaturan dan Evaluasi Hak Tanah	12
125	Kepala Seksi Pengaturan dan Evaluasi Wilayah I	9
126	Kepala Seksi Pengaturan dan Evaluasi Wilayah II	9
127	Kepala Subdirektorat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai	12
128	Kepala Seksi Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Wilayah I	9
129	Kepala Seksi Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Wilayah II	9
130	Kepala Subdirektorat Hak Guna Usaha	12
131	Kepala Seksi Penetapan Hak Guna Usaha Wilayah I	9
132	Kepala Seksi Penetapan Hak Guna Usaha Wilayah II	9
133	Direktur Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang	15
134	Kepala Subdirektorat Pendaftaran Hak Tanah	12
135	Kepala Seksi Pendaftaran Hak Atas Tanah	9
136	Kepala Seksi Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Hak Tanah	9
137	Kepala Subdirektorat Pendaftaran Hak Guna Ruang dan Perairan	12

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
138	Kepala Seksi Pendaftaran Hak Guna Ruang Atas dan Bawah Tanah	9
139	Kepala Seksi Pendaftaran Hak Guna Ruang Perairan	9
140	Kepala Subdirektorat Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	12
141	Kepala Seksi Peralihan dan Pembebanan Hak	9
142	Kepala Seksi Pejabat Pembuat Akta Tanah	9
143	Direktur Landreform	15
144	Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Basis Data Landreform	12
145	Kepala Seksi Inventarisasi Data Landreform	9
146	Kepala Seksi Basis Data Landreform	9
147	Kepala Subdirektorat Penguasaan Tanah Obyek Landreform dan Ganti Kerugian	12
148	Kepala Seksi Penguasaan Tanah Obyek Landreform	9
149	Kepala Seksi Penertiban Tanah Objek Landreform dan Ganti Kerugian	9
150	Kepala Subdirektorat Redistribusi dan Pemanfaatan Bersama Atas Tanah	12
151	Kepala Seksi Redistribusi Tanah Obyek Landreform	9
152	Kepala Seksi Peralihan Tanah Obyek Landreform dan Pemanfaatan Bersama Atas Tanah	9
153	Direktur Pemberdayaan Masyarakat	15
154	Kepala Subdirektorat Inventarisasi Potensi dan Pendampingan Pemberdayaan	12
155	Kepala Seksi Inventarisasi Potensi	9
156	Kepala Seksi Pendampingan Pemberdayaan	9
157	Kepala Subdirektorat Fasilitasi dan Kerja Sama Pemberdayaan	12
158	Kepala Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama Lembaga Pemerintah	9
159	Kepala Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah	9
160	Kepala Subdirektorat Informasi dan Pengembangan Model Pemberdayaan	12
161	Kepala Seksi Informasi Pemberdayaan Masyarakat	9

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
162	Kepala Seksi Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat	9
163	Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan	17
164	Direktur Penatagunaan Tanah	15
165	Kepala Subdirektorat Perencanaan Penatagunaan Tanah	12
166	Kepala Seksi Perencanaan Regional	9
167	Kepala Seksi Perencanaan Sektoral	9
168	Kepala Subdirektorat Data dan Neraca Penatagunaan Tanah	12
169	Kepala Seksi Pengolahan Data Penatagunaan Tanah	9
170	Kepala Seksi Neraca Penatagunaan Tanah	9
171	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penatagunaan Tanah	12
172	Kepala Seksi Tanah Negara dan Tanah Kritis	9
173	Kepala Seksi Pertimbangan Penatagunaan Tanah	9
174	Direktur Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	15
175	Kepala Subdirektorat Program dan Kerja Sama	12
176	Kepala Seksi Program dan Data	9
177	Kepala Seksi Kerja Sama	9
178	Kepala Subdirektorat Penataan Kawasan	12
179	Kepala Seksi Penataan Wilayah Pesisir dan Wilayah Tertentu	9
180	Kepala Seksi Penataan Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Perbatasan	9
181	Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi	12
182	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Wilayah Pesisir dan Wilayah Tertentu	9
183	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Perbatasan	9
184	Direktur Pemantauan dan Pembinaan Pertanahan	15
185	Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Evaluasi Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan	12
186	Kepala Seksi Inventarisasi Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan	9
187	Kepala Seksi Evaluasi Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan	9
188	Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian	12

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
189	Kepala Seksi Data Tanah Pertanian	9
190	Kepala Seksi Evaluasi Tanah Pertanian	9
191	Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Non Pertanian	12
192	Kepala Seksi Data Tanah Non Pertanian	9
193	Kepala Seksi Evaluasi Tanah Non Pertanian	9
194	Direktur Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	15
195	Kepala Subdirektorat Potensi Tanah Terlantar	12
196	Kepala Seksi Identifikasi Tanah Terlantar	9
197	Kepala Seksi Pengelolaan Basis Data Tanah Terlantar	9
198	Kepala Subdirektorat Penertiban Tanah Terlantar	12
199	Kepala Seksi Evaluasi dan Verifikasi Tanah Terlantar	9
200	Kepala Seksi Penetapan Tanah Terlantar	9
201	Kepala Subdirektorat Pendayagunaan Tanah Terlantar	12
202	Kepala Seksi Penyediaan Tanah Terlantar	9
203	Kepala Seksi Pengaturan Peruntukan Tanah Terlantar	9
204	Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	17
205	Direktur Pengadaan Tanah Wilayah I	15
206	Kepala Subdirektorat Bimbingan dan Fasilitasi Penanganan Pengadaan Tanah Wilayah I	12
207	Kepala Seksi Bimbingan Pengadaan Tanah	9
208	Kepala Seksi Fasilitasi Penanganan Pengadaan Tanah	9
209	Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pengadaan Tanah Wilayah I	12
210	Kepala Seksi Inventarisasi dan Identifikasi	9
211	Kepala Seksi Ganti Rugi dan Penyerahan Hasil	9
212	Kepala Subdirektorat Penetapan Hak Instansi Wilayah I	12
213	Kepala Seksi Penetapan Hak Pengelolaan	9
214	Kepala Seksi Penetapan Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Milik dan Hak Guna Usaha Instansi	9
215	Direktur Pengadaan Tanah Wilayah II	15
216	Kepala Subdirektorat Bimbingan dan Fasilitasi Penanganan Pengadaan Tanah Wilayah II	12
217	Kepala Seksi Bimbingan Pengadaan Tanah	9
218	Kepala Seksi Fasilitasi Penanganan Pengadaan Tanah	9

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
219	Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pengadaan Tanah Wilayah II	12
220	Kepala Seksi Inventarisasi dan Identifikasi	9
221	Kepala Seksi Ganti Rugi dan Penyerahan Hasil	9
222	Kepala Subdirektorat Penetapan Hak Instansi Wilayah II	12
223	Kepala Seksi Penetapan Hak Pengelolaan	9
224	Kepala Seksi Penetapan Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Milik dan Hak Guna Usaha Instansi	9
225	Direktur Penilaian Tanah	15
226	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Kerja Sama Penilaian Tanah	12
227	Kepala Seksi Pengembangan Metodologi, Model dan Aplikasi	9
228	Kepala Seksi Kerja Sama dan Promosi	9
229	Kepala Subdirektorat Penilaian Bidang Tanah dan Kawasan	12
230	Kepala Seksi Penilaian Bidang Tanah	9
231	Kepala Seksi Penilaian Kawasan	9
232	Kepala Subdirektorat Bimbingan Teknis Penilai Tanah dan Penilai Pertanahan	12
233	Kepala Seksi Bimbingan Penilai Tanah	9
234	Kepala Seksi Bimbingan Penilai Pertanahan	9
235	Direktur Konsolidasi Tanah	15
236	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan	12
237	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Teknis	9
238	Kepala Seksi Penyusunan Potensi Obyek Konsolidasi Tanah	9
239	Kepala Subdirektorat Penataan Tanah dan Bimbingan Teknis	12
240	Kepala Seksi Penataan Tanah	9
241	Kepala Seksi Bimbingan Teknis	9
242	Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Evaluasi	12
243	Kepala Seksi Kerja Sama	9
244	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	9
245	Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan	17
246	Direktur Sengketa dan Konflik Pertanahan	15

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
247	Kepala Subdirektorat Penanganan Sengketa	12
248	Kepala Seksi Penanganan Sengketa Wilayah I	9
249	Kepala Seksi Penanganan Sengketa Wilayah II	9
250	Kepala Subdirektorat Penanganan Konflik	12
251	Kepala Seksi Penanganan Konflik Wilayah I	9
252	Kepala Seksi Penanganan Konflik Wilayah II	9
253	Kepala Subdirektorat Analisis dan Pembatalan	12
254	Kepala Seksi Analisis dan Pembatalan Wilayah I	9
255	Kepala Seksi Analisis dan Pembatalan Wilayah II	9
256	Direktur Perkara Pertanahan	15
257	Kepala Subdirektorat Perkara Pertanahan Wilayah I	12
258	Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah I	9
259	Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I	9
260	Kepala Subdirektorat Perkara Pertanahan Wilayah II	12
261	Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah II	9
262	Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah II	9
263	Kepala Subdirektorat Analisis dan Pembatalan	12
264	Kepala Seksi Analisis dan Pembatalan Wilayah I	9
265	Kepala Seksi Analisis dan Pembatalan Wilayah II	9
266	Direktur Informasi Strategis dan Bantuan Hukum	15
267	Kepala Subdirektorat Informasi Strategis Pertanahan	12
268	Kepala Seksi Informasi Strategis Wilayah I	9
269	Kepala Seksi Informasi Strategis Wilayah II	9
270	Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Informasi	12
271	Kepala Seksi Identifikasi dan Analisis Informasi Wilayah I	9
272	Kepala Seksi Identifikasi dan Analisis Informasi Wilayah II	9
273	Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum	12
274	Kepala Seksi Bantuan Hukum Wilayah I	9
275	Kepala Seksi Bantuan Hukum Wilayah II	9
276	Inspektur Utama	17
277	Inspektur Wilayah I	15
278	Inspektur Wilayah II	15
279	Inspektur Wilayah III	15
280	Inspektur Wilayah IV	15

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
281	Inspektur Wilayah V	15
282	Kepala Bagian Tata Usaha	12
283	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program	9
284	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi	9
285	Kepala Subbagian Persuratan dan Rumah Tangga	9
286	Kepala Subbagian Informasi dan Pelaporan	9
287	Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat	15
288	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
289	Kepala Bidang Perundang-Undangan	12
290	Kepala Subbidang Penyusunan dan Evaluasi	9
291	Kepala Subbidang Penyiapan dan Pertimbangan Hukum	9
292	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat	12
293	Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Media Center	9
294	Kepala Subbidang Penerangan dan Penyuluhan Masyarakat	9
295	Kepala Bidang Publikasi, Jaringan Dokumentasi, dan Informasi Hukum	12
296	Kepala Subbidang Publikasi, Distribusi dan Dokumentasi	9
297	Kepala Subbidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	9
298	Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	15
299	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
300	Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	12
301	Kepala Subbidang Pengembangan Teknologi dan Informasi Pertanahan	9
302	Kepala Subbidang Standarisasi Teknologi Informasi Pertanahan	9
303	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Penerapan Teknologi Informasi Pertanahan	12
304	Kepala Subbidang Pengelolaan Data Pertanahan	9
305	Kepala Subbidang Penerapan Teknologi Informasi Pertanahan	9
306	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	12

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
307	Kepala Subbidang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	9
308	Kepala Subbidang Administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	9
309	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan	15
310	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
311	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	15
312	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
313	Kepala Bidang Penyelenggaraan	12
314	Kepala Subbidang Penyelenggaraan Diklat Struktural	9
315	Kepala Subbidang Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional	9
316	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	12
317	Kepala Subbidang Perencanaan Diklat	9
318	Kepala Subbidang Evaluasi Dan Pelaporan Diklat	9
319	Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	15
320	Kepala Bagian Administrasi Umum	11
321	Kepala Subbagian Keuangan	9
322	Kepala Subbagian Kepegawaian	9
323	Kepala Subbagian Perencanaan dan Umum	9
324	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	11
325	Kepala Subbagian Pendidikan dan Kerjasama	9
326	Kepala Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni	9
327	Kepala Subbagian Akademik dan Pengajaran	9
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI		
328	Kepala Kantor Wilayah	15
329	Kepala Bagian Tata Usaha	12
330	Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan	12
331	Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	12
332	Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan	12
333	Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat	12
334	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	12

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
335	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9
336	Kepala Subbagian Kepegawaian	9
337	Kepala Subbagian Umum dan Informasi	9
338	Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar	9
339	Kepala Seksi Pemetaan Tematik	9
340	Kepala Seksi Pengukuran Bidang	9
341	Kepala Seksi Survei Potensi Tanah	9
342	Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan	9
343	Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum	9
344	Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah	9
345	Kepala Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	9
346	Kepala Seksi Penatagunaan Tanah	9
347	Kepala Seksi Penataan Kawasan Tertentu	9
348	Kepala Seksi Landreform	9
349	Kepala Seksi Konsolidasi Tanah	9
350	Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan	9
351	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9
352	Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	9
353	Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan	9
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA		
354	Kepala Kantor Pertanahan	13
355	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
356	Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan	9
357	Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	9
358	Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan	9
359	Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat	9
360	Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara	9
361	Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan	8
362	Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian	8
363	Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan	8

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
364	Kepala Subseksi Tematik Dan Potensi Tanah	8
365	Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah	8
366	Kepala Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah	8
367	Kepala Subseksi Pendaftaran Hak	8
368	Kepala Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	8
369	Kepala Subseksi Penatagunaan Tanah Dan Kawasan Tertentu	8
370	Kepala Subseksi Landreform Dan Konsolidasi Tanah	8
371	Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan	8
372	Kepala Subseksi Pemberdayaan Masyarakat	8
373	Kepala Subseksi Sengketa Dan Konflik Pertanahan	8
374	Kepala Subseksi Perkara Pertanahan	8

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL



FERRY MURSYIDAN BALDAN

## LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA  
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
JABATAN FUNGSIONAL UMUM		
1.	Pembina Karakter	8
2.	Analisis Bantuan Hukum	7
3.	Analisis Barang Milik Negara	7
4.	Analisis Data Keuangan	7
5.	Analisis Data Pengadaan Tanah	7
6.	Analisis Data Pertanahan	7
7.	Analisis Data Tanah Non Pertanian	7
8.	Analisis Data Tanah Pertanian	7
9.	Analisis Data Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan	7
10.	Analisis Dokumentasi dan Informasi Hukum	7
11.	Analisis Dokumentasi dan Informasi	7
12.	Analisis Hukum dan Perundang-Undangan	7
13.	Analisis Hukum Pertanahan	7
14.	Analisis Informasi Strategis	7
15.	Analisis Instrumen Evaluasi Diklat	7
16.	Analisis Jabatan dan Kinerja Organisasi	7
17.	Analisis Kendali Mutu Survei, Pengukuran dan Pemetaan	7
18.	Analisis Kerjasama dan Publikasi Hasil Litbang dan Pengembangan Perpustakaan	7
19.	Analisis Kinerja	7
20.	Analisis Konsolidasi Tanah	7
21.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7
22.	Analisis Landreform	7
23.	Analisis Laporan Keuangan	7
24.	Analisis Organisasi	7

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
25.	Analisis Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan	7
26.	Analisis Pemantauan, Evaluasi, dan Akuntabilitas	7
27.	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7
28.	Analisis Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu	7
29.	Analisis Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang	7
30.	Analisis Penegakan Integritas SDM Aparatur	7
31.	Analisis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	7
32.	Analisis Penetapan Hak Atas Tanah	7
33.	Analisis Pengadaan Barang dan Jasa	7
34.	Analisis Pengaduan Masyarakat	7
35.	Analisis Pengaturan Pertanahan	7
36.	Analisis Pengembangan SDM	7
37.	Analisis Pengendalian dan Pengelolaan Pertanahan	7
38.	Analisis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	7
39.	Analisis Penilai Tanah dan Pemeta Nilai Tanah	7
40.	Analisis Penilaian Tanah dan Kawasan	7
41.	Analisis Penyelenggaraan Diklat	7
42.	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7
43.	Analisis Permasalahan Pertanahan	7
44.	Analisis Permohonan Hak Tanah dan pendaftaran Tanah	7
45.	Analisis PNPB	7
46.	Analisis Program Diklat	7
47.	Analisis Sarana dan Prasarana	7
48.	Analisis SDM Pengawasan	7
49.	Analisis Seleksi Surveyor Berlisensi	7
50.	Analisis Sengketa Konflik Pertanahan	7
51.	Analisis Sistem Informasi Pertanahan	7
52.	Analisis Tata Laksana	7
53.	Analisis Tuntutan Ganti Rugi	7
54.	Bendahara Penerimaan	7
55.	Bendahara Pengeluaran	7
56.	Evaluator Program Kerja dan Anggaran	7
57.	Evaluator Tanah Non Pertanian	7
58.	Evaluator Tanah Pertanian	7
59.	Evaluator Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan	7
60.	Konselor	7

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
61.	Kuasa Hukum Pertanahan	7
62.	Mediator Pertanahan	7
63.	Penyuluh dan Fasilitator Hukum Pertanahan	7
64.	Penyuluh dan Fasilitator Pertanahan	7
65.	Penyusun Bahan Keprotokolan	7
66.	Penyusun Bahan Ketatausahaan	7
67.	Penyusun Bahan Pengamanan Pimpinan	7
68.	Penyusun Bahan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai	7
69.	Penyusun Bahan Tata Usaha Pelayanan Pertanahan	7
70.	Penyusun Bidang Pemeliharaan dan Fasilitas Gedung	7
71.	Penyusun Bidang Pengelolaan Kendaraan dan Perjalanan Dinas	7
72.	Penyusun Informasi Pertanahan	7
73.	Penyusun Laporan Persuratan	7
74.	Penyusun Laporan Kegiatan Diklat	7
75.	Penyusun Laporan Keuangan	7
76.	Penyusun Laporan Pengawasan	7
77.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7
78.	Penyusun Rencana Pendidikan dan Kerjasama	7
79.	Petugas Promosi Konsolidasi Tanah	6
80.	Administrator Komputer	6
81.	Penerima Layanan Pengaduan	6
82.	Pengelola Bidang Pemeliharaan dan Fasilitas Gedung	6
83.	Pengelola Administrasi Barang Milik Negara	6
84.	Pengelola Alat Pengukuran dan Pemetaan	6
85.	Pengelola Anggaran	6
86.	Pengelola Aset BMN	6
87.	Pengelola Bidang Hukum	6
88.	Pengelola Data Akademik dan Pengajaran	6
89.	Pengelola Data Anggaran	6
90.	Pengelola Data Evaluasi dan Pelaporan	6
91.	Pengelola Data Geospasial	6
92.	Pengelola Data Hak Atas Tanah	6
93.	Pengelola Data Informasi Strategis	6
94.	Pengelola Data Keuangan	6

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
95.	Pengelola Data Konsolidasi Tanah	6
96.	Pengelola Data Landreform	6
97.	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat	6
98.	Pengelola Data Penatagunaan Tanah	6
99.	Pengelola Data Pengendalian Pertanahan	6
100.	Pengelola Data Surveyor Berlisensi	6
101.	Pengelola Data Tanah Non Pertanian	6
102.	Pengelola Data Tanah Pertanian	6
103.	Pengelola Data Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan	6
104.	Pengelola Data Tanah Terlantar	6
105.	Pengelola Data WP3WT	6
106.	Pengelola Dokumen dan Alat Pengukuran dan Pemetaan	6
107.	Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum	6
108.	Pengelola Informasi Pertanahan	6
109.	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6
110.	Pengelola Laboratorium	6
111.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pertama	6
112.	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6
113.	Pengelola Perpustakaan	6
114.	Pengelola SAI	6
115.	Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor	6
116.	Pengelola Sistem Informasi Pengawasan	6
117.	Pengolah Penatagunaan Tanah	6
118.	Pengolah Bahan Organisasi	6
119.	Pengolah Data Bahan Pembinaan Teknis Surveyor Berlisensi	6
120.	Pengolah Data Akuntabilitas	6
121.	Pengolah Data Bantuan Hukum	6
122.	Pengolah Data dan Informasi Nilai Tanah	6
123.	Pengolah Data Evaluasi	6
124.	Pengolah Data Evaluasi dan Laporan	6
125.	Pengolah Data Kemahasiswaan dan Alumni	6
126.	Pengolah data Kepegawaian	6
127.	Pengolah Data Kerugian Negara	6
128.	Pengolah Data Keuangan	6

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
129.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6
130.	Pengolah Data Pejabat Pembuat Akta Tanah	6
131.	Pengolah Data Pemantauan	6
132.	Pengolah Data Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang	6
133.	Pengolah Data Pengadaan Tanah	6
134.	Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan	6
135.	Pengolah Data Penyusunan Bahan Pembinaan Teknis Pengukuran dan Pemetaan	6
136.	Pengolah Data Perencanaan dan Kerjasama	6
137.	Pengolah Data Perkara Pertanahan	6
138.	Pengolah Data Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	6
139.	Pengolah Data PNPB	6
140.	Pengolah Data Sengketa Konflik Pertanahan	6
141.	Pengolah Data Tata Laksana	6
142.	Pengolah Jabatan dan Kinerja Organisasi	6
143.	Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa	6
144.	Sekretaris Pimpinan	6
145.	Verifikator Berkas Permohonan Hak	6
146.	Petugas Penggandaan	6
147.	Pembuat Daftar Gaji	5
148.	Pengadministrasi Gaji	5
149.	Pengadministrasi Keuangan	5
150.	Pengadministrasi Umum	5
151.	Pengumpul Data Kegiatan Diklat	5
152.	Pengumpul Data Pertanahan	5
153.	Pengumpul Data Survei, Pengukuran dan Pemetaan	5
154.	Pengumpul Data Tekstual dan Spasial	5
155.	Petugas CCTV	5
156.	Petugas Protokol	5
157.	Pranata Fotografi	5
158.	Teknisi Listrik dan Jaringan	5
159.	Pengamanan dan Pengawalan	3
160.	Pengelola Urusan Rumah Tangga	3
161.	Pengemudi	3
162.	Petugas Keamanan	3

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU		
1.	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6
2.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7
3.	Analisis Kepegawaian Pertama	8
4.	Analisis Kepegawaian Muda	9
5.	Arsiparis Madya	11
6.	Arsiparis Muda	9
7.	Arsiparis Pertama	8
8.	Arsiparis Pelaksana	6
9.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
10.	Arsiparis Penyelia	8
11.	Arsiparis Pelaksana Pemula	5
12.	Assessor SDM Pertama	9
13.	Auditor Pertama	8
14.	Auditor Muda	9
15.	Auditor Madya	11
16.	Dosen Asisten Ahli	9
17.	Dosen Lektor	11
18.	Dosen Lektor Kepala	13
19.	Dosen Guru Besar	15
20.	Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Pertama	8
21.	Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Muda	9
22.	Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Madya	11
23.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
24.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	9
25.	Perencana Pertama	8
26.	Perencana Muda	9
27.	Perencana Madya	11
28.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6
29.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7
30.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
31.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8
32.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
33.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
34.	Pranata Komputer Pelaksana	7
35.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
36.	Pranata Komputer Pertama	8
37.	Pustakawan Pelaksana	6
38.	Pustakawan Pertama	8
39.	Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula	5
40.	Surveyor Pemetaan Pelaksana	6
41.	Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan	7
42.	Surveyor Pemetaan Penyelia	8
43.	Surveyor Pemetaan Pertama	8
44.	Surveyor Pemetaan Madya	11
45.	Surveyor Pemetaan Muda	9
46.	Widyaiswara Pertama	8
47.	Widyaiswara Muda	9
48.	Widyaiswara Madya	11
49.	Widyaiswara Utama	13
50.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
51.	Peneliti Pertama	8
52.	Peneliti Muda	9
53.	Peneliti Madya	11

Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional



Ferry Mursyidan Baldan